

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA  
(STUDI DI DESA WAWOLESEA KECAMATAN LASOLO KABUPATEN  
KONAWA UTARA)**

<sup>1</sup>Melis, <sup>2</sup>Abd. Azis Muthalib dan <sup>3</sup>Apoda  
<sup>1</sup>Mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo  
<sup>2,3</sup>Staf Pengajar Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo  
Email: Melis.virgo@yahoo.com

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the level of public participation of development in Wawolesea Village Lasolo District of North Konawe; and the factors that affect the level of public participation in the Wawolesea Village. The data obtained by questionnaires. Participation is measured by likert scale from respondent self assessment . Respondent of this study are 20 person consist: village administrative apparatus, communities, and institute for village empowerment (LPM). Data analyzed used descriptive. The results showed that the level of community participation of development in the Wawolesea Village is in very high category. The community have about 80.67 percent level participation in the planning or in very high category, 77.8 percent for imlementation or in high category, and about 84.25 percent in utilization or in very high category. While for evaluation the community have about 79 percent or in high category. Determinant of public participation in Wawolesea Village are awareness, education, income, village administrative apparatus and the facilities of village.*

**Keywords:** public, participation, development

## **1. Pendahuluan**

Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal. Bratakusumah (1999) mengatakan bahwa paradigma pembangunan yang sangat dikembangkan sekarang ini adalah paradigma pemberdayaan yang berintikan partisipasi masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah tidak lagi sebagai provider, tetapi lebih bertindak sebagai intermediasi dan katalisator segenap perencanaan pembangunan. Artinya pemerintah seharusnya memberikan kepercayaan dan kesempatan yang lebih banyak kepada

masyarakat, didalam menumbuh kembangkan segala potensi yang dimilikinya bersama dengan lingkungannya. Dengan kata lain bagaimana mengkondisikan agar pembangunan menjadi bagian integral dari rakyat, sehingga mereka berperan sebagai subyek pembangunan yang dominan menentukan keberhasilan pembangunan (Kartasasmita, 1997).

Pembangunan partisipatif harus dimulai dengan masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang kebutuhannya. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah daerah harus dapat memosisikan diri sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembangunan desa.

Pembangunan di wilayah pedesaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang semakin memantapkan ketahanan masyarakat dalam upaya meletakkan dasar dan landasan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan ketahanan nasional. Untuk itu, pembangunan pedesaan diarahkan kepada kegiatan pengembangan secara terpadu dan menyeluruh dengan cara memperdayakan setiap komponen dimasyarakat dalam rangka meningkatkan pengembangan masing-masing desa. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Selain itu juga diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat guna bersama-sama melaksanakan program pembangunan desa.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara juga telah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangatlah penting demi terwujudnya hasil-hasil pembangunan desa di Desa Wawolesea. Sebagai wujud adanya partisipasi masyarakat di Desa Wawolesea saat ini, telah dibangun berbagai infrastruktur seperti gedung posyandu, gedung masjid, gedung SD, gedung PAUD, balai desa, kantor desa, deker, selokan air dan jalan usaha tani. Selain pembangunan infrastruktur tersebut di Desa Wawolesea dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat seperti bakti sosial (BAKSOS). Bakti sosial ini dilaksanakan tiap hari jum,at semua masyarakat ikut berpartisipasi seperti membersihkan masjid, kantor desa, balai desa dan jalan raya.

Partisipasi masyarakat Desa Wawolesea relatif bervariasi baik dari segi intensitasnya maupun dari segi bentuknya. Dari segi intensitasnya ada yang partisipasinya sangat rendah, dan ada pula yang sangat tinggi. Dan dari segi bentuknya ada yang partisipasinya dalam bentuk pemikiran/ide, dan ada pula yang partisipasinya dalam bentuk materi dan uang tunai.

Intensitas dan bentuk partisipasi masyarakat di atas dapat pula berbeda diantara bidang-bidang partisipasi dalam pembangunan, seperti dibidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring, dan pemanfaatan hasil/pengawasan. Secara teori perbedaan tersebut dapat pula disebabkan oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dimaksud adalah kesadaran/kemauan, pendidikan, dan penghasilan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kepemimpinan dan fasilitas yang tersedia. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji lebih mendalam mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara.

## 2. Studi Literatur

Konsep partisipatif mengandung makna luas dan arti yang amat dalam, dimana pada proses pembangunan partisipasi itu berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan partisipasi dapat berfungsi pada fase penerimaan informasi, fase pemberian tanggapan terhadap informasi, fase perencanaan pembangunan, fase pelaksanaan pembangunan, penerimaan kembali hasil pembangunan dan fase penilaian pembangunan, sehingga partisipasi berfungsi menumbuhkan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

Partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini adalah masyarakat (Pasaribu, 1992). Untuk menumbuhkan dan menggerakkan semangat partisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat. Partisipasi sebenarnya sangat beranekaragam, bukan sekedar perkumpulan masyarakat disatu tempat tertentu untuk mendengarkan penjelasan mengenai- yang dilarang dari atas. Partisipasi adalah sebuah bentuk keterlibatan mental/pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Keith Davis dalam Sastropetro, 1998). Ada tiga unsur penting yang dimaksud dalam definisi Keith Davis tentang partisipasi, yang memerlukan perhatian khusus yaitu: (1) bahwa partisipasi atau keikutsertaan (keterlibatan/peran serta) sesungguhnya merupakan suatu keterikatan mental dan perasaan, lebih daripada kata-kata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah; (2) ketersediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota dalam kelompok dengan segala nilainya; (3) unsur tanggung jawab, unsur ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Diakui sebagai anggota berarti ada: “(sense of belonging)” (Sastropetro, 1998).

Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap pengembangan masyarakat dimana-mana, seolah-olah menjadi”lebal baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktikkan sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikutserta keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Pada dasarnya partisipasi itu dilandasi dengan adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut adalah karena diantara orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalang peran serta semua pihak itu diperlukan; (1) terciptanya suasana yang bebas atau demokratis dan (2) terbinanya kebersamaan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan perencanaan pembangunan dan ikutserta pemanfaatan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Menurut pemahaman umum, partisipasi mensyaratkan adalah akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi terhadap upaya pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Jadi partisipasi masyarakat mencakup semua aspek interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Slamet (1999) menyebutkan dua macam partisipasi yaitu partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal dan partisipasi yang dilakukan bawahan dengan atasan, antara klien dan patron atau antara masyarakat sebagai suatu

keseluruhan dengan pemerintah dalam berbagai kegiatan politis secara pemungutan suara, kampanye dan sebagainya disebut sebagai partisipasi dalam proses politik. Sedangkan keterlibatan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disebut partisipasi dalam proses administratif.

Mengenai bentuk dan tahap partisipasi dapat dicermati dari sebagai pendapat sebagai mana dirangkum Ndraha (1990) berikut ini: (1) partisipasi dalam/melalui kontak yang lain (*contact change*) sebagai salah satu bentuk titik awal perubahan; (2) partisipasi dalam bentuk memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya; (3) partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termaksud dalam pengambilan keputusan/penetapan rencana. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditimbulkan sedini mungkin didalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut mereka, partisipasi yang bersifat teknis/desain proyek; (4) partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan; (5) partisipasi dalam penerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang disebut "*participation in benefitts*"; (6) partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatkan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terdapat beberapa macam bentuk partisipasi, yang bergantung kepada situasi dan keadaan keperluan partisipasi tersebut. Menurut Keith Davis dalam Sastropetro (1998) bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut: (a) konsultasi dalam bentuk jasa; (b) sumbangan spontan berupa uang atau barang; (c) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dananya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berasal dari luar lingkungan tertentu (dermawan/pihak ketiga); (d) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh seluruh komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti, rapat desa yang menentukan anggarannya); (e) sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat; (f) aksi masa; (g) mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri; (h) membangun proyek komuniti yang bersifat otonomi.

Bentuk-bentuk partisipasi ini dalam kegiatan pelaksanaannya tentunya memerlukan prasyarat, salah satunya adalah unsur kesukarelaan dalam melakukan peran serta tersebut, karena dalam melakukan peran serta atau partisipasi berarti melakukan keterlibatan terhadap suatu masalah yang memerlukan peran serta dari berbagai kalangan disekelilingnya untuk dapat mencapai tujuan. Proses peran Serta atau Partisipasi menggambarkan keterlibatan personal dalam bentuk: (1) proses pengambilan keputusan; (2) menentukan kebutuhan yang diinginkan; dan (3) menunjukan dan mewujudkan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai (Sastropetro, 1998)

Penelitian Hendryk (2013) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik maupun non fisik telah cukup aktif. Hal demikian dilihat dari partisipasi aktif masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa. Perbedaan utamanya adalah bahwa pada penelitian tersebut pembangunan lebih banyak memberikan fokus pada tahap perencanaan. Hal tersebut dikarenakan penelitian dilakukan sebelum Undang-undang Desa disahkan. Sementara saat ini Undang-undang Desa telah disahkan dan didalamnya diatur bahwa proses pembangunan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya terletak

pada setting penelitian saja, yaitu waktu dan tempat penelitian, lebih dari itu, penelitian ini juga memiliki kekhasannya sendiri dibanding penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Kekhasan tersebut berkaitan dengan pembahasan partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa, adanya pembagian bahasan dan tahap pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), serta digunakannya Undang-undang Desa Tahun 2014 yang telah disahkan dalam penelitian ini.

Pada sisi lain hasil penelitian Megawati (2008) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dengan adanya komunikasi yang baik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Komunikasi yang bersifat dialogis, berbasis kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, yang menempatkan komunikator dan komunikan dalam posisi yang sama sebagai subyek, akan meningkatkan keterlibatan mental/emosional, kontribusi dan tanggung jawab dalam pembangunan.

### 3. Metode Penelitian

Data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan. Responden penelitian merupakan masyarakat Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo sebanyak 20 responden. Responden berasal dari Aparat Pemerintah Desa, Ketua LPM dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner. Data penelitian terkait partisipasi masyarakat yang dikumpulkan berupa partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring dan pemantauan hasil. Pengukuran partisipasi digunakan *self assessment* dengan skala likert (1= sangat rendah; skala likert 5= sangat tinggi). Data dianalisis secara deskriptif dengan bantuan persentase. Adapun rentang skala pada masing-masing indikator maupun secara total dalam menentukan tingkat partisipasi, yaitu:

Skor dalam persentase	Keterangan
0-20	Sangat Rendah
21-40	Rendah
41-60	Sedang
61-80	Tinggi
>80	Sangat Tinggi

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*

Tabel 1 menyajikan hasil rekapitulasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Wawolesea sesuai masing-masing indikator. Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan partisipasi masyarakat sangat tinggi, namun menurun pada tahap pelaksanaan. Namun masyarakat terlibat kembali dalam tahap monitoring kegiatan. Dan menurun kembali pada tahap pemanfaatan hasil.

Namun secara total seluruh indikator partisipasi hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dalam pembangunan desa di Desa Wawolesea tergolong kategori sangat tinggi yakni skor gabungan keempat bidang partisipasi masyarakat

dalam pembangunan desa mencapai 1.284 atau berada pada interval 1281 sampai 1600 yaitu sangat tinggi. Sedangkan dilihat dari skala skor gabungan relatif partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Wawolesea mencapai 80,25 persen, berarti dalam hal ini tergolong sangat tinggi dan berada pada interval 80 sampai 100 persen. Adapun tingkat partisipasi masyarakat secara total berada pada kategori sangat tinggi.

Tabel 1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Wawolesea 2015

Tahap Partisipasi	Persentase (%)	Penilaian Partisipasi
Perencanaan	80,67	Sangat tinggi
Pelaksanaan	77,80	Tinggi
Evaluasi/monitoring	84,25	Sangat tinggi
Pemanfaatan hasil	79,00	Tinggi
Rata-rata	80,43	Sangat Tinggi

Sumber : Data Primer Desember 2015 (Diolah)

#### *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Wawolesea*

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berada pada kategori sangat tinggi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu faktor interen dan eksteren. Faktor interen berupa kesadaran/kemauan masyarakat itu sendiri, pendidikan dan pendapatan masyarakat. Faktor Pendidikan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan adalah . Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Faktor pendapatan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat khususnya dalam bentuk sumbangan dana kegiatan. Pada sisi lain, tingkat kesibukan aktivitas juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pada sisi lain, faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dari aspek eksternal yaitu: dorongan pemerintah desa dan ketersediaan fasilitas desa.

## **5. Simpulan**

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Wawolesea yaitu dilihat keempat bidang partisipasi yaitu perencanaan mencapai skor 80,67 persen atau berada pada kategori sangat tinggi , pelaksanaan mencapai skor 77,8 persen atau berada pada kategori tinggi, evaluasi/monitoring 84,25 persen berada pada kategori sangat tinggi, dan pemanfaatan hasil 79 persen berada pada kategori tinggi. Secara total tingkat partisipasi masyarakat tergolong sangat tinggi. Beberapa faktor yang

mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat yaitu: kesadaran masyarakat, pendidikan, pendapatan, pemerintah desa dan fasilitas yang tersedia.

### **Daftar Pustaka**

- Adisasmita, R., 2006. Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Beratha, N.I., 1992, Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hartoyo, dkk.,1996, Buku Materi Pokok Konsep Pembangunan Masyarakat Desa, Karunika, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Hendryk, 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1(2): 612-625
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997, Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
- Kumrotomo, W., 1999., Etika Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Megawati, 2008. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Studi Di Kotamadya Jakarta Selatan Universitas Padjadjaran.
- Ndaraha, T., 1990, Pembangunan Masyarakat: Mempersipakan Masyarakat Tinggal Landas, Rineka Cipta, Jakarta
- Pasaribu, I.L., dan Simajuntak. B., 1992., Sosiologi Pembangunan: Tarsito, Bandung.
- Sastropoerto. R.A.S., 1998, Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan: Alumni, Bandung.
- Slamet. Y., 1999, Konsep Dasar Partisipasi Sosial. PAU-SS, UGM, Yogyakarta.